BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait keuangan negara bahwa: “Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri”. Mengacu pada pemaparan Nirajenani & Lely, (2018) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksa berupa iuran yang dibayarkan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan tidak mendapatkan imbalan dari negara secara langsung. Berdasarkan atas kewenangan, pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah”. Penulisan ini dipusatkan terhadap salah satu jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan motor. Di Kabupaten Karawang, perkembangan total masyarakat (penduduk) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Populasi Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2018 - 2020

Kecamatan	Tahun (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Pangkalan	38.698	38.995	39.269
Tegalwaru	37.496	37.783	38.049
Ciampel	43.200	43.532	43.840
Telukjambe Timur	138.982	140,046	141.029
Telukjambe Barat	53.576	53.987	54.366
Klari	170,553	171.857	173.068
Cikampek	117.495	118.396	119.230
Purwasari	69.472	70,005	70,499
Tirtamulya	48.609	48.982	49.326

Kecamatan	Tahun (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Jatisari	79.051	79.657	80,219
Banyusari	56.007	56.436	56.833
Kotabaru	131.427	132.434	133.367
Cilamaya Wetan	82.685	83.318	83.904
Cilamaya Kulon	65.629	66.131	66.597
Lemahabang	66.703	67.215	67.688
Talagasari	66.047	66.554	67.021
Majalaya	48.323	48.693	49.036
Karawang Timur	129.537	130,529	131.446
Karawang Barat	170,684	171.995	173.210
Rawamerta	53.417	53.826	54.205
Tempuran	64.341	64.834	65.290
Kutawaluya	58.994	59.446	59.864
Rengasdengklok	114.720	115.600	116.414
Jyakerta	65.787	66.292	66.758
Pedes	77.031	77.622	78.168
Cilebar	43.276	43.607	43.914
Cibuaya	53.422	53.831	54.211
Tirtajaya	67.979	68.500	68982
Batujaya	82.721	83.357	83.944
Pakisjaya	40,147	40,455	40,741
Kabupaten Karawang	2.336.009	2.353.915	2.370,488

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat Kabupaten Karawang mesti kepentingan akan kendaraan di Karawang yang makin tinggi dari masa kemasa. Keadaan ini berpengaruh akan penambahan kendaraan individu masyarakat, penilaian tersebut berdasarkan meningkatnya jumlah kedaraan bermotor yang berperan sebagai objek. Berikut data jumlah kendaraan bermotor di karawang periode 2016-2020.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	Roda Dua (Unit)	Roda Empat (Unit)	Jumlah(Unit)
2016	750,552	86.532	837.084
2017	751.990	87.978	839.968
2018	753.461	89.432	842.893
2019	754.090	91.392	845.482
2020	757.679	93.894	851.573

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Menurut informasi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang menyatakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya menjadi penyebab hal tersebut terjadi. Meskipun daftar pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah dalam kategori normal, namun pada tahun 2018 tercatat sekitar 40% atau 337.157 pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunda pembayaran pajaknya. Dengan kondisi tersebut menjadikan observasi ini menemukan fenomena atas kesadaran dan kepatuhan pihak wajib pajak kendaraan bermotor masih dalam kategori rendah, hal tersebut mempengaruhi banyaknya tunggakan akan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 3 Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang Tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	%
2014	172.433.230,000	189.988.879.300	110,18
2015	204.333.000,000	211.659.962.300	103.59
2016	240,864.000,000	250,283.704.900	103.92
2017	251.390,000,000	269.712.673.400	107.29
2018	309.415.000,000	324.940,184.400	105.02

Tahun	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	%
2019	577.518.600,000	595.679.612.780	103.44
2020	664.114.700,000	664.496.752.923	100,06

Sumber: BPS Kabupaten Karawang

Hal ini yang menjadikan peneliti tertantang untuk meneliti hal yang berkenaan dengan faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selaku pemilik kendaraan bermotor dalam pembayaran pajaknya khususnya di kabupaten Karawang. Dalam obsevasi sebelumnya ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap epatuhan wajib pajak dalam membayar tanggung jawab perpajakannya seperti: tingkat penghasilan, sosialisasi perpajaan, sangsi pajak modernisasi sistem administrasi perpajakan. Namun dalam obsesvasi ini, peneliti menggunakan tiga faktor yaitu: tingkat pendapatan, penagihan pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Tingkat penghasilan wajib pajak dapat diketahui melalui kesanggupan dan dorongan wajib pajak dalam melunasi tanggung jawab pajaknya. Menurut Johanes (2011) berpendapat bahwa: “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya apabila nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Namun menurut informasi dari beberapa masyarakat di Kabupaten Karawang mereka kesulitan untuk membayar pajak karena pada umumnya mereka cenderung memilih untuk menggunakan pendapatannya dalam pemenuhan kebutuhannya dibandingkan membayar pajaknya. Selain tingkat pendapatan, dietahui pengaruh lain yng mejnadi faktor tingkat kepatuhan wajib pajak seperti penagihan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Melalui hasil pemikiran Chairil Anwar Pohan, (2017:219) bahwa: “Penagihan pajak adalah suatu tindakan agar penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya”. Menurut informasi salah satu pegawai dari Kantor Samsat di Kabupaten Karawang menyatakan sekitar 300,000 kendaraan atau 40% persen dari total kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Karawang, diketahui pajaknya tidak dibayar. Sementara jumlah kendaraan yang terkena tilang (tindakan langsung) naik dari 2.000 per bulan menjadi 10,000 per bulan. Karawang juga masuk 10 besar daerah di Jawa Barat yang tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup tinggi. Oleh sebab itu diperlukan strategi penagihan pajak dengan sifat mengikat dan belandaskan hukum yang kuat.

Pemerintah berupaya keras mencari strategi agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, salah satu strategi tersebut dengan memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang terupdate sesuai dengan perkembangan teknologi di era global saat ini. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diciptakan pemerintah merupakan temuan baru untuk teknis pembayaran pajak yang sudah diterapkan pemerintah melalui pelaksanaan pembayaran pajak yang semakin bervariasi dan mudah seperti: samsat keliling, E-samsat, Samsat Masuk Desa, Samsat Outlet, dan sistem samsat lainnya yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Melalui strategi ini pemerintah mengharapkan berkurangnya kendala yang dialami wajib pajak dalam pembayaran pajak motornya di samsat. Dari informasi yang didapat dari beberapa wajib pajak di Kabupaten Karawang ini mereka menyatakan bahwa masih belum efisien dan efektif pelayanan di Samsat yang berhubungan dengan prosedur dan sistem pembayaran pajak seperti proses pelunasan pajak yang termasuk kategori lambat yang disebabkan oleh penerapan cara manual, dan antrian panjang yang menjadikan para wajib pajak beralasan hal tersebut melelahkan dan memakan waktu produktif para wajib pajak.

Melalui penelitian terdahulu oleh Pradipta A Virgiawati (2019) menunjukkan bahwa: “Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Berbeda dengan penelitian Damayanti & Amah (2017) yang menunjukkan bahwa: “Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak.” Pada penelitian Mardiana dkk. (2016) menunjukkan bahwa: “Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”, namun penelitian Isawati (2016) bahwa : “tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengangkat variable lainnya yaitu penagihan pajak”. Menurut hasil penelitian Yanti (2018) menunjukkan bahwa: “penagihan pajak kendaraan bermotor secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasil observasi oleh Mohammad, dkk (2017) bahwa: “penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak”. Menurut penelitian Sutrisno, dkk (2016), Syafrudin, dkk (2017), dan Arfaningsih (2018) menyatakan bahwa: “penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang modern ini dibuat untuk membantu wajib pajak agar patuh terhadap peraturan administrasi perpajakan”. Dan penelitian oleh Pangarepan, dkk (2017) juga memperlihatkan penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang.
3. Sulitnya membayar pajak yang dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu karena mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu.
4. Banyaknya wajib pajak terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Karawang yang tidak melunasi hutang pajaknya.
5. Rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Karawang terkait sistem dan prosedur pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam dan sempurna maka peneliti melihat permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Batasan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Karawang.
2. Bidang ilmu penelitian berfokus pada ilmu Akuntansi Perpajakan.
3. Objek penelitian penelitian yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang.
4. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan variabel tingkat pendapatan, penagihan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Perumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015:228) rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Bagaimana tingkat pendapatan, penagihan pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengkaji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk mengkaji secara simultan pengaruh tingkat pendapatan, penagihan pajak,

dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis ataupun secara praktis, diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menurut penjelasan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama perihal masalah pemahaman pengaruh tingkat pendapatan, peangihan pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan serta menjadi sarana untuk menerapkan teori – teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari - hari dalam bermasyarakat.

b. Bagi Lembaga Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor bersama SAMSAT kota Karawang.

c. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi sehingga mampu berjalan dengan lancar.